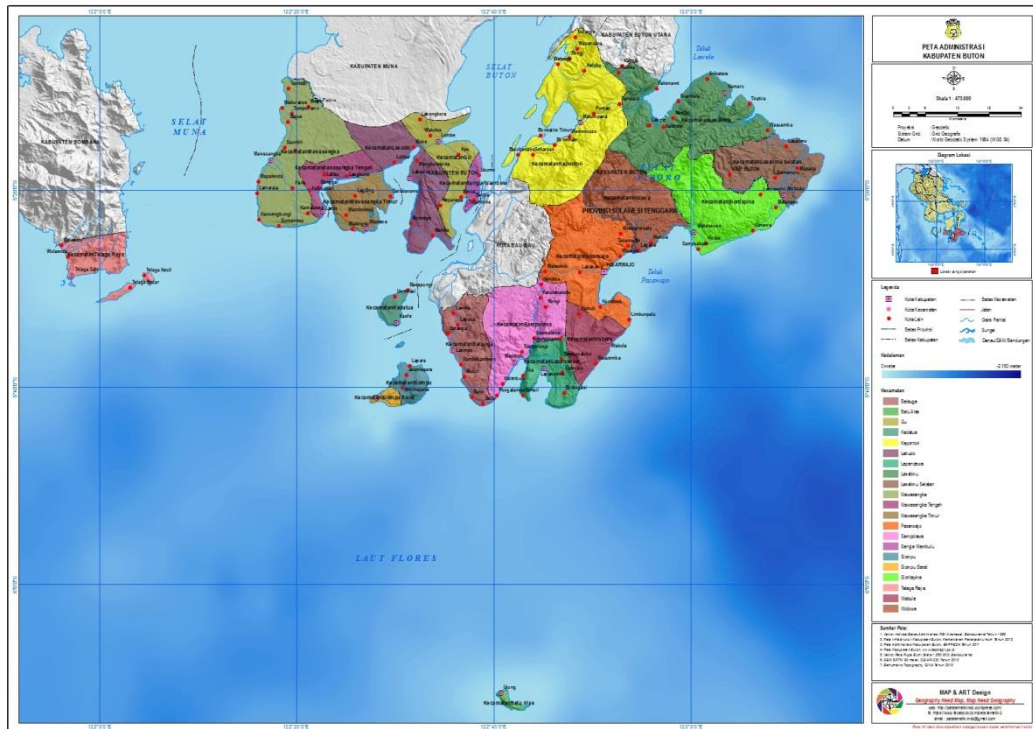


BAB IV

Deskripsi Objek Penelitian

4.1 Kabupaten Buton

Gambar 1. Peta Kabupaten Buton



Sumber : *Profil Kabupaten Buton tahun 2008*

Kabupaten Buton Adalah Kabupaten yang terletak Kabupaten Buton memiliki wilayah daratan seluas $\pm 2.488,71 \text{ km}^2$ atau 248.871 ha dan wilayah perairan laut diperkirakan seluas $\pm 21.054 \text{ km}^2$, berbatasan dengan:

Barat : Kota Baubau

Timur : Kabupaten Wakatobi

Utara : Kabupaten Buton Utara

Selatan : Laut Flores dan Kabupaten Buton Selatan

Dari sudut oceanografi memiliki perairan laut yang masih luas, yaitu diperkirakan sekitar $21.054.69 \text{ km}^2$ setelah berpisah dengan Kabupaten Wakatobi

dan Kabupaten Bombana. Wilayah perairan tersebut sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan dan pengembangan wisata bahari, karena disamping hasil ikan dan hasil laut lainnya, juga memiliki panorama laut yang sangat indah yang tidak kalah dengan daerah lain di Indonesia.

4.1.1 Pemerintahan

Komposisi perolehan kursi di DPRD Kabupaten Buton hasil Pemilu 2014 berdasarkan partai peserta pemilu dan daerah pemilihan di mana Partai Golkar mendapat kursi terbanyak dengan 6 kursi disusul oleh PBB, PPP, PAN, PNBK dan PDIP dengan 3 kursi, selanjutnya PK Sejahtera dan PBR masing-masing dengan 2 kursi dan PKPI, PKPB, P. Indonesia, PDK dan PKB masing-masing 1 kursi dari total 30 kursi di DPRD Kabupaten Buton.

Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton keadaan tahun 2014 setelah pemekaran Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan, terdiri dari 7 kecamatan, yaitu: Kecamatan Pasarwajo, Kecamatan Wabula, Kecamatan Wolowa Kecamatan Siotapina, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kecamatan Lasalimu, dan Kecamatan Kapuntori. Sedangkan Wilayah sebelum pemekaran dua daerah yaitu Buton Selatan dan Buton tengah terdiri dari: Kabupaten Buton Selatan Ibu kota kabupaten ini yaitu Batauga. Dengan 7 kecamatan yaitu: Batauga, Sampolawa, Siompu, Siompu Barat, Kadatua, Batu Atas, Lapandewa. Kabupaten Buton Tengah dengan Ibu kota kabupaten ini yaitu Labungkari, dengan tujuh kecamatan yaitu: Lakudo, Gu, Sangiawambulu, Mawasangka, Mawasangka Tengah, Mawasangka Timur, Talaga Raya

Jumlah desa/kelurahan keadaan tahun 2014 adalah 207 desa/kelurahan yang terdiri dari 183 desa dan 24 kelurahan. Menurut klasifikasi desa/kelurahan, dari 183 desa/kelurahan di Kabupaten Buton pada tahun 2014 ada sebanyak 144 desa (87,27%) merupakan desa swadaya dan sisanya 21 desa (12,73%) merupakan desa swakarya.

4.1.2 Jumlah Penduduk

Kabupaten Buton menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2012 berjumlah 240.958 jiwa, di mana penduduk laki-laki berjumlah 118.894 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 122.064 jiwa. Sedangkan berdasarkan hasil Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) tahun 2013, tercatat jumlah penduduk sebanyak 257.159 jiwa, sehingga dalam tiga tahun terdapat kenaikan sejumlah 16.901 jiwa atau sekitar 2,25 persen per tahun.

Pada tahun 2014 jumlah penduduk mencapai 265.724 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 132.271 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 133.453 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 3,33 persen. Keadaan struktur umur penduduk menunjukkan bahwa pada tahun 2014 sebesar 41,04% atau sebesar 109.045 jiwa, penduduk adalah tergolong usia muda yang berusia 15 tahun ke bawah.

Di Kabupaten Buton pada tahun 2014 tercatat sebanyak 192.426 jiwa penduduk yang termasuk dalam penduduk usia kerja yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 94,196 jiwa atau 48,94% dan penduduk perempuan sebanyak 98.266 jiwa atau 51,06%. Jumlah penduduk yang kerja ada sebanyak 102.090 jiwa atau sebesar 88,16% dari total penduduk angkatan kerja, dapat juga dikatakan

sebesar 53,04% terhadap penduduk usia kerja, sedangkan penduduk yang sedang mencari pekerjaan sebanyak 13.710 jiwa atau sebesar 11,84% dari total angkatan kerja dan 7,12% terhadap penduduk usia kerja.

4.1.3 Tingkat Pendidikan

Pada tahun 2013 jumlah sekolah TK ada sebanyak 57 unit dan tahun 2014 meningkat menjadi sebanyak 69 unit sekolah. Jumlah guru juga mengalami peningkatan, tahun 2013 sebanyak 155 orang dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 197 orang. Jumlah murid tahun 2013 sebanyak 2.402 orang dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 3.007 murid.

Perkembangan jumlah Sekolah Dasar dari tahun 2013 hingga tahun 2014 terus mengalami kenaikan, yaitu dari 224 unit sekolah. Walaupun demikian jumlah guru dan murid tidak selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, jumlah guru dan murid masing-masing 1.745 orang dan 45.935 orang. Namun pada tahun 2014 jumlah guru dan murid SD menurun menjadi masing-masing 1.518 orang dan 41.758 orang. (Kec. Batauga 13 SD, Kec. Batuatas 5 SD, Kec. Lapandewa 7 SD, Kec. Sampolawa 16 SD, Kec Siompu 10 SD, Kec. Siompu Barat 7 SD dan Kec. Kadatua 8 SD).

Untuk jenjang Pendidikan SLTP pada tahun 2013 jumlah SLTP ada sebanyak 43 unit, namun pada tahun 2014 menurun menjadi 35 buah sekolah. Untuk jumlah guru pada tahun 2013 sebanyak 860 orang, namun pada tahun 2014, menurun menjadi hanya sebanyak 688 orang. Jumlah murid juga mengalami hal serupa, pada tahun 2013 sebanyak 13.062 orang, namun pada tahun 2014 menurun menjadi hanya sebesar 11.635 orang.

Dari jenjang SLTA tahun 2013 jumlah sekolah ada sebanyak 12 unit sekolah, pada tahun 2014 meningkat menjadi 15 unit sekolah. Jumlah guru tahun 2013 sebanyak 260 orang dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 308 orang. Jumlah murid tahun 2013 sebanyak 3.693 orang sedangkan tahun 2014 meningkat menjadi 4.121 orang. Rasio guru terhadap sekolah pada tahun 2014 sebanyak 21 orang. Angka ini menurun jika dibandingkan tahun 2013 yang rata-rata sebanyak 22 orang. Rasio murid terhadap sekolah tahun 2014 sebanyak 308 orang dan rasio murid terhadap guru sebanyak 13 orang (data BPS).

4.1.4 Agama

Mayoritas penduduk di Kabupaten Buton memeluk agama Islam, yaitu sebanyak 265.869 orang atau 98,78% disusul yang memeluk agama Hindu sebanyak 1.807 orang penduduk atau sebesar 0,67%. Pada tahun 2014 terdapat 260 unit masjid, 22 langgar/mushola, 8 unit gereja dan 11 unit pura (data BPS).

4.2 *Parabela* di Kabupaten Buton

Kesultanan Buton terbagi atas beberapa wilayah *kadhie* yang terdiri dari 72 Kadhie. Di setiap wilayahnya terdapat pemimpin daerah dimasing-masing kadhie, dari Kadhie-kadhie inilah kemudian terdapat pemimpin dilingkup yang paling rendah yaitu *parabela* yang sekarang bisa disamakan dengan Kepala Desa. Dalam struktur pemerintahan desa pun terdapat perangkat-perangkat dengan tugasnya masing-masing, sama halnya dalam pemerintahan desa dalam adat-istiadat Kabupaten Buton terdapat struktur perangkat adat yang dipimpin oleh *parabela*. Pada kesultanan Buton *Parabela* adalah sebutan untuk pemimpin atau ketua dari

perangkat adat yang disebut dengan Sara Kadie. Perangkat adat tersebut secara garis besar terdiri dari dua bagian, yaitu Sara Adati dan Sara Hukumu. Pembagian Sara Adati dan Sara Hukumu didasari oleh kepentingan duniawi dan spiritual. Urusan ada yang berhubungan dengan duniawi seperti masalah tanah dan sumber daya alam akan diurus oleh perangkat adat Sara Adati. Sementara itu, Sara Hukumu akan lebih banyak mendampingi *Parabela* mengurus persoalan spiritual, seperti ibadah dan ritual-ritual tertentu. Pemilihan kedua perangkat adat tersebut dilakukan sendiri oleh *Parabela* dengan meminta pertimbangan dari tetua adat, termasuk *Kayaro* yang merupakan mantan *Parabela*.

Seorang *Parabela* yang menjadi pemimpin haruslah memenuhi kriteria tertentu, kriteria utama menjadi *Parabela* haruslah memiliki garis keturunan dan mewarisi darah dari *Parabela* sebelumnya. Namun demikian, seorang anak atau keturunan dari *Parabela* tidak secara otomatis dapat memegang jabatan sebagai *Parabela* sebab *Parabela* tersebut akan dipilih langsung oleh. Seorang *Parabela* juga harus memahami hukum adat secara substansial. Selain itu, seorang calon *Parabela* juga harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan seperti *amembali* (sakti), *atomaeka* (wibawa), *aumane* (berani), *akoadati* (beradat), *atoamsiaka* (disegani), *atobungkale* (terbuka), dan *akosabara* (kesabaran). Apabila calon *Parabela* telah memenuhi syarat-syarat tersebut, pemilihan mereka akan melalui persetujuan tetua adat terlebih dahulu, terutama *Kayaro* yang merupakan mantan *Parabela*.

Di samping itu, seorang *Parabela* hanya boleh seorang laki-laki. Namun demikian, sebelum mencalonkan diri menjadi *Parabela*, mereka harus memiliki istri terlebih dahulu. Seseorang yang belum memiliki istri tidak diperbolehkan

menjadi *Parabela*. Begitu pula bagi *Parabela* yang istrinya meninggal, ia harus rela melepas jabatannya sebagai *Parabela*. Hal itu jelas menunjukkan posisi perempuan sangat penting untuk menentukan lelaki berpeluang menjadi *Parabela* atau tidak. Sebab, ketua hendak dikukuhkan menjadi *Parabela*, ia harus memperoleh restu dari istrinya terlebih dahulu. Hal itu bagi sangat penting mengingat mereka tidak mungkin memilih pemimpin adat yang sebelumnya belum berpengalaman dalam memimpin keluarga.

Mula-mula, sebelum *Parabela* baru dikukuhkan, *Parabela* sebelumnya harus melakukan kegiatan peramalan (kelola) terlebih dahulu. Apabila tetua adat merasa bahwa kilala-nya baik, maka yang bersangkutan akan dikukuhkan menjadi *Parabela* setelah sebelumnya memperoleh persetujuan istri. Apabila istri tidak menyetujui, maka pengukuhan *Parabela* akan dibatalkan. Sementara untuk durasi atau lamanya jabatan sebagai *Parabela*, tidak memiliki batasan tertentu. Seorang *Parabela* bisa mengundurkan diri apabila memang merasa sudah tidak mampu lagi menjadi *Parabela*, seperti kondisi kesehatan yang tidak lagi memungkinkan. Namun demikian, anggota akan menolaknya apabila dirasa sang *Parabela* masih di rasa mampu menjalankan pemerintahan adat di perkampungan mereka.

Selain itu, juga bisa meminta *Parabela* yang ada untuk mundur dari jabatannya apabila istri *Parabela* tersebut telah meninggal dunia. Tanda-tanda alam juga digunakan sebagai indikator apakah pemerintahan *Parabela* yang ada masih layak untuk dilanjutkan atau tidak. Tanda-tanda alam itu meliputi bencana alam dan gagal panen yang menimpa. Hal itu pernah terjadi di akhir masa pemerintahan Kesultanan Buton atau sekitar tahun 1960-an. Beberapa hari setelah *Parabela*

terpilih, mengalami gagal panen. Ketua adat dengan didukung oleh masyarakat kemudian meminta *Parabela* yang menjabat untuk meletakkan jabatannya.

Dapat dilihat bahwa menjadi seorang *Parabela* bukan hal yang mudah, karena jabatan yang diembannya haruslah benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang seharusnya bahkan dalam pemilihannya pun menerapkan prinsip musyawarah sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila. Syarat-syarat yang menjadi syarat seorang *parabela* inilah bisa menjadi landasan yang kuat bagi masyarakat untuk mempercayai seorang *parabela*, Karena penetapannya bukan hanya di tunjuk begitusaja namun dia harus memenuhi syarat-syarat sebagai seorang pemimpin dan meskipun seseorang memenuhi syarat namun keputusan juga datang dari istri apakah mengizinkan atau tidak untuk diangkat menjadi *parabela*.

Pemimpin yang menjalankan tugasnya sesuai ketentuan dan tanpa adanya kepentingan-kepentingan pribadi bahkan berkongkalingkong dengan keluarganya sendiri. Prinsip-prinsip kepemimpinan yang di pegang teguh oleh *parabela* inilah yang menjadikan masyarakat sangat mempercayai seorang *parabela*. Dalam upacara pelantikan *parabela* terdapat prosesi yang bahkan dalam demokrasi yang dianut sekarang belum ada sama sekali. Pada prosesi upacara pelantikan Presiden misalnya, Presiden hanya membacakan sumpah di hadapan pimpinan dan anggota MPR dibawah Al-Qur'an. Dalam kasus pelantikan *parabela* bukan hanya bersumpah dihadapan masyarakat namun masyarakat juga bersumpah akan turut dan taat kepada apapun perintah dari seorang *parabela* (dalam konteks atuaran

adat). Sehingga terjalin sumpah yang timbal balik antara pemimpin dan masyarakatnya.

Parabela dalam struktur adat memiliki tugas dan fungsi pokok, terutama untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak La Ode Alirman (wawancara tanggal 17 september 2019) dapat dijabarkan penjelasan lebih detail tentang tugas dan fungsi *parabela* adalah sebagai berikut:

a. Adati (Pemangku Adat)

Parabela disebut sebagai pemimpin atau ketua sekaligus pemangku adat tertinggi dalam struktur adat *Parabela* akan bertindak sebagai wakil masyarakat dalam berbagai macam kepentingan, termasuk menjaga hubungan MHA dengan pihak luar;

b. Bicuno Lele (Pemberi Informasi)

Parabela haruslah seorang yang memiliki pengetahuan tentang adat secara mendalam. Dalam praktiknya, *Parabela* akan bertugas untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait sejarah, hutan adat (kaombo), serta larangan dan sanksi dalam hukum adat Untuk menjalankan fungsi tersebut, pengetahuan yang mendalam tentang adat tentu amat diperlukan

c. Pamondo (Mediator)

Tugas atau fungsi lain *Parabela* adalah sebagai mediator dalam berbagai sengketa atau persoalan yang dialami oleh anggota. Sengketa yang paling umum dialami oleh biasanya berkaitan dengan penguasaan tanah.

Meskipun *Parabela* memiliki kekuasaan yang tertinggi menyangkut hajat hidup, *Parabela* tidak boleh semena-mena dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil atas dasar pertimbangan pribadi sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu oleh perangkat adat sebelum diumumkan ke seluruh anggota. *Parabela* juga dapat mengambil keputusan dengan mempertimbangkan pendapat perangkat desa lain seperti *Moji*, *Wati*, dan *Pande*. Hal yang paling utama dalam pengambilan keputusan itu haruslah dilakukan dengan transparan dan tidak ditutup-tutupi dari apa pun atau disebut dengan istilah atobungkale. Transparansi tersebut penting dilakukan terutama yang berkaitan dengan keputusan adat tertinggi atau unano kabotoki.

Sementara itu, apabila permasalahan yang hendak dipecahkan *parabela* tergolong rumit, maka musyawarah yang melibatkan seluruh perangkat adat perlu dilakukan di rumah *parabela*. Apabila permasalahan tersebut belum juga menemukan titik terang, maka *parabela* dapat melakukan musyawarah lanjutan di Baruga yang merupakan tempat pertemuan seluruh perangkat dan tokoh adat. Musyawarah tersebut akan dihadiri oleh perangkat adat, tokoh adat, *Kayaro*, dan pihak-pihak yang bertikai. Semua peserta musyawarah memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat mereka.

Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, *parabela* juga memiliki kewenangan dalam pengaturan tanah dan sumber daya alam. Hak ulayat tersebut

dinilai mengandung dimensi hukum perdata seperti kepemilikan bersama dalam sekaligus hukum publik yang berisi kewenangan dalam mengatur masyarakatnya sendiri. Secara tidak langsung, *parabela* juga memiliki kewenangan untuk menyentuh dimensi hukum perdata dan hukum publik tersebut.

Sebaran tokoh adat di Kabupaten Buton dibagi berdasarkan etnis, Kesultanan Buton sendiri terdiri dari berbagai etnis diantaranya *laporo* dan *cia-cia*. Etnis *cia-cia* merupakan etnis yang cukup besar jumlahnya dan tersebar di beberapa daerah. Ada beberapa aturan yang tidak tertulis tentang bagaimana *parabela* bisa dihidupkan di suatu wilayah. Hal ini berdasarkan pembagian wilayah kekuasaan yang diberikan oleh Kesultanan Buton. Etnis *Laporo* yang tidak mendapatkan wilayah dari Kesultanan Buton kemudian membuat wilayahnya sendiri dan mengangkat *parabelanya* sendiri, apabila masyarakat etnis *laporo* mendiami sebuah wilayah baru dan mulai berkembang di wilayah tersebut mereka bisa mengangkat *parabelanya* sendiri. Hal tersebut menyebabkan peningkatan jumlah *parabela* di wilayah etnis *Laporo* ini. Etnis *Laporo* secara administratif berada paling banyak di Kecamatan Pasarwajo.

Lain halnya dengan etnis *cia-cia* yang telah diberikan tempat oleh Kesultanan Buton. Sehingga etnis *cia-cia* memiliki *parabela* yang terbatas sesuai dengan wilayah yang mereka tempati. Etnis *cia-cia* tidak bisa mengangkat *parabela* yang baru apabila membuat pemukiman baru di sebuah wilayah. Mereka akan mengikuti *parabela* dimana wilayah asal mereka. Persebaran *parabela* untuk etnis *cia-cia* secara administratif berada di Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Sampolawa, Kecamatan Wabula.

Kecamatan Pasarwajo Desa Dongkala dan Kondowa memiliki satu Parabela, Kel Holimombo, Kel Takimpo, Kombeli, Awainulu, Laburunci, Pasarwajo Banabungi, Kambulabulana, Lapodi dua parabela, Warinta, Wanguwangu, Kaongke-ongkea, Wasaga, Kancinaa.

Parabela yang tersebar saat ini di dua kabupaten yaitu Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Selatan. Hal ini disebabkan karena pemekaran Kabupaten Buton pada tahun 2014 yang terpecah menjadi tiga Kabupaten yakni Kabupaten Buton, Buton Tengah, dan Buton Selatan. Sehingga pada Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2007 selain mengalami penurunan jumlah pemilih terdapat penurunan jumlah *parabela* di Kabupaten Buton secara khusus.

Table 1. Sebaran Parabela Berdasar Wilayah Kadhie

No.	Kadhie	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten
1.	Kamolanta	Kamelanta	Kapuntori	Buton
2.	Wabula	Bajo Bahari, Holimombo, Wabula, Wabula I, Wasampela, Wasuempa.	Wabula	Buton
3.	Busoa	Busoa	Batauga	Buton Selatan
4.	Batauga	Laompo	Batauga	Buton Selatan
5.	Kambe-Kambero	Masiri	Batauga	Buton Selatan
6.	Bola	Bola	Batauga	Buton Selatan
7.	Siompu	Biwinapada, Kaimbulawa, Molona, Lontoi.	Siompu	Buton Selatan
8.	Kadatua	Kadatua, Kapoa, Banabungi, Uwemaasi	Kadatua	Buton Selatan
9.	Sampolaw	Wapulaka (Bahari, Bahari 2, dan Bahari 3)	Sampolawa	Buton Selatan
10.	Burangasi	Burangasi, Burangasi Rumbia, Gerak Makmur	Lapandewa	Buton Selatan

11.	Lantongau	Samulewa	Sampolawa	Buton Selatan
12.	Laporo	Kombeli, Katolemando (Rongi)	Pasarwajo dan Sampolawa	Buton dan Buton Selatan
13.	Peropa	Bajo Bahari, Holimombo, Koholimombana, Wabula, Wabula 1, Wasampela, Wasuemba	Wabula	Buton
14.	Kancinaa	Kancinaa	Pasarwajo	Buton
15.	Wasaga	Wasaga	Pasarwajo	Buton
16.	Lapodi	Lapodi	Pasarwajo	Buton
17.	Takimpo	Takimpo	Pasarwajo	Buton
18.	Holimombo	Holimombo	Pasarwajo	Buton
19.	Lasalimu	Lasalimu	Lasalimu	Buton
20.	Ambuau	Ambuau	Lasalimu Selatan	Buton

Sumber: Diolah Oleh Penulis Berdasarkan Naskah Martabat Tujuh

4.3 Pemilukada di Kabupaten Buton

Munculnya UU No 32 Tahun 2004 menjadi langkah awal proses demokrasi yang menjadi cikal bakal bagi masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya dalam memilih pemimpin yang diinginkannya. Bukan hanya pemilihan presiden bahkan sampai pada pemilihan gubernur dan bupati/walikota. Terkhusus pada pemilihan bupati di Kabupaten Buton yang telah dilaksanakan sebanyak empat kali terhitung dengan pelaksanaan PSU pada tahun 2012.

4.3.1 Pilkada 2006

Pilkada 2006 adalah pilkada langsung Kabupaten Buton pertama kalinya setelah sebelumnya Bupati Buton dipilih oleh DPRD Kabupaten Buton. Pada pilkada Kabupaten Buton ini pasangan calon yang ikut berpartisipasi terdapat lima pasangan calon, dengan Sjafei Kahar sebagai Bupati Buton Periode sebelumnya

kembali mencalonkan diri kembali. Pasangan Calon yang ikut dalam pilkada Tahun 2006 adalah:

Table 2. Daftar Paslon Pilkada 2006

No.	Pasangan Calon
1.	Sjafei Kahar Dan Ali La Opa
2.	Kasim dan Sumardin
3.	Sjamsul Qamar dan La Ode Alirman
4.	Sahiruddin Udu dan La Suwu
5.	Nurdin Gani dan La Aradia

4.3.2 Pilkada 2011

Pilkada Buton 2011 lebih beragam lagi bukan hanya calon yang diusung oleh partai politik namun juga calon perseorangan. Setelah keluarnya Putusan MK No. 5 / PUU-V/ 2007 menjadi salah satu pilihan dalam mekanisme pencalonan selain menggunakan partai politik, maka bakal calon yang ingin berpartisipasi dalam pilkada bisa melalui jalur independen. Hal ini juga berdampak dengan banyaknya pasangan calon yang mendaftar pada pilkada Kabupaten Buton tahun 2011. Terdapat empat paslon yang mendaftar melalui jalur independen semuanya lolos dalam verifikasi KPU. Adapun pasangan calon yang ikut dalam pilkada Buton tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Table 3. Daftar Paslon Pilkada 2011

No.	Pasangan Calon	Partai Pendukung
1.	H. M Yasin Welson Lajaha dan H. ABD. Rahman Abdullah	Independen
2.	Dr. Azhari, S.STP, M.Si dan H. Haba Kasim	PPP, PKB, PDP, PBR, Barnas, PNI, Marhaenisme, Merdeka.
3.	Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si. dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi.	PKS, GOLKAR

4.	Drs. H. Djaliman Mady, MM dan Muh. Saleh Ganiru, S.Ag.	Hanura, PBB, PKNU
5	La Sita dan Zuliadi, S.Sos.	Independen
6	La Ode M. Syafrin Hanamu, S.T. dan Drs. Ali Hamid	Independen
7	Ali La Opa, S.H. dan Drs. La Diri, MA	PDIP, PPD, PKPI, PPPI
8	Edy Karno, S.Pd., M.Pd. dan Zainuddin, S.H.	Independen
9	Samsu Umar Abdul Samiun, S.H dan Drs. La Bakry, M.Si.	PAN, PPRN, dan PDK

Sumber: Data KPU Kabupaten Buton

4.3.3 Pemilukada 2012

Hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2011 ini kemudian disengketakan ke MK dan hasil putusan MK maka Pilkada Buton dilakukan PSU pada Tahun 2012. Dari Sembilan pasangan calon yang ikut dalam Pilkada Buton 2011 yang lolos verifikasi PSU 2012 hanya enam orang pasangan calon. Dan dari empat paslon independen hanya satu yang berhasil lolos untuk mengikuti PSU 2012 Beberapa pasangan calon Untuk pasangan calon yang mengikuti PSU Kabupaten Buton tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Table 4. Daftar Paslon Pilkada 2012

No.	Pasangan Calon	Partai Pendukung/Independen
1.	H. M Yasin Welson Lajaha dan H. ABD. Rahman Abdullah	Independen
2.	Dr. Azhari, S.STP, M.Si dan H. Haba Kasim	PPP, PKB, PDP, PBR, Barnas, PNI, Marhaenisme, Merdeka.
3.	Agus Feisal Hidayat, S.Sos., M.Si. dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi.	PKS, GOLKAR
4.	Drs. H. Djaliman Mady, MM dan Muh. Saleh Ganiru, S.Ag.	Hanura, PBB, PKNU
5.	Ali La Opa, S.H. dan Drs. La Diri, MA	PDIP, PPD, PKPI, PPPI
6.	Samsu Umar Abdul Samiun, S.H dan Drs. La Bakry, M.Si.	PAN, PPRN, dan PDK
7.	H. La Uku, SH., Dani, B.Sc.	Demokrat, Gerindra, PPNUI, Pelopor, Buruh Kedaulatan, PKP, PPIB, PPI, PMB dan PSI.

Sumber: KPU Kabupaten Buton

4.3.4 Pilkada Tahun 2017

Pilkada Buton tahun 2017 hanya memunculkan satu pasangan calon yakni pasangan calon SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, S.H dan Drs. LA BAKRY, M.Si. dengan partai pengusungnya adalah PAN, PKS, Golkar, Nasdem, PKPI, PBB, Gerindra, dan Demokrat. Samsu Umar dan La Bakry merupakan pasangan petahana yang menang dalam PSU Kabupaten Buton tahun 2012. Dan berarti bahwa lawan mereka adalah kotak kosong dan juga mereka melawan para pendukung dan relawan dari bakal calon yang mendaftar sebelumnya yakni H. Hamid dan Farid Bachmid yang tidak memenehusi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi KPU Kabupaten Buton karena mereka hanya memiliki dukungan 16 % dari syarat minimal 20 %.

4.4 Daftar Calon yang didukung Parabela

Dalam Kontestasi pilkada Buton sudah empat kali digelar selama pasca orde baru. Pilkada pertama pada tahun 2006, pilkada kedua tahun 2011, pilkada ketiga tahun 2012, dan pilkada ke empat tahun 2017. Dari keempat pilkada tersebut tentunya pasangan yang bertarung untuk memenangkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Buton mencoba untuk mendapatkan dukungan dari *parabela*. dari hasil wawancara dengan narasumber dan beberapa data pendukung lainnya dapat dirangkum pasangan yang mendapatkan dukungan dari *parabela* adalah sebagaia berikut:

Table 5. Daftar Calon dengan dukungan Parabela

No.	Pilkada	Pasangan Calon Yang didukung
1.	2006	L.M Sjafei Kahar dan Ali La OPa

2.	2011	Agus Feisal Hidayat dan Yaudu Salam Adjo
3.	2012	Agus Feisal Hidayat dan Yaudu Salam Adjo
4.	2017	Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry